

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

- Cowie, N. (2009). Observation. Dalam *Qualitative Research in Applied Linguistics* (hal. 165-181). Londonyang berarti Palgrave Macmillan.
- Suliantoro, I. (2019). *Penyusunan Informasi Kinerja*. PKN STAN.
- Suliantoro, I. (2021). *Monev dan Pengukuran Kinerja*. PKN STAN.
- Sulistio, E. (2010). Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *Jurnal Ilmiah, Vol 1, No.1*.
- Djiwandono, P. (2015). *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Kementerian Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2015 tentang Langkah-Langkah Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi*.

- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2019). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPPN Khusus Investasi 2019.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2019). *Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Khusus Investasi 2019.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2020). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPPN Khusus Investasi 2020.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2020). *Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Khusus Investasi 2020.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2021). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPPN Khusus Investasi 2021.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. (2021). *Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Khusus Investasi 2021.*